

DOKUMEN

RENCANA AKSI DAERAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KOTA KOTAMOBAGU 2016 - 2030



Kerjasama

**BAPPEDA Kota Kotamobagu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Negeri Gorontalo
2016**

Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals SDGs Kota Kotamobagu Tahun 2016 – 2030

Diterbitkan atas Kerjasama Antara
Bappeda Kota Kotamobagu
dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNG

Tim Penyusun

Yowan Tamu, M.A
Zulkifli Tanipu M.A
Novi Rusnarty Usu, S.Pd., M.A
Prof. Dr Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum
Dr. Sastro Wantu, M.Hum
Drs. Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, M.Hum

BAPPEDA Kota Kotamobagu
Jl. Kampus Mogolaing Kotamobagu 95716
Phone: +62-434-2629109
INDONESIA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo 96128
Phone: +62-0435-821125 Fax: +62-435-821752
INDONESIA
Laman: <http://www.ung.ac.id>



KATA PENGANTAR

Kepala BAPPEDA Kota Kotamobagu

Ungkapan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatNya sehingga Dokumen Rencana Aksi Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) Kota Kotamobagu 2016 – 2030 dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) Kota Kotamobagu 2016 – 2030. Penyusunan RAD-SDGs Kota Kotamobagu merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Kota Kotamobagu dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030. Dokumen ini berisi penjabaran rencana aksi dan program yang akan digunakan sebagai landasan penentuan arah kebijakan dan penetapan program prioritas pembangunan Kota Kotamobagu lima belas tahun ke depan

Pada kesempatan ini, selaku Kepala Bappeda yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, implementasi dan monitoring program serta kegiatan pembangunan di daerah, menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, Kepala SKPD, Para Kepala Bidang di lingkungan Bappeda serta segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNG yang telah memberikan mandat penugasan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja secara profesional dalam penyusunan dokumen RAD-SDGs Kota Kotamobagu 2016 – 2030.

Akhirnya besar harapan kami, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam mengemban misi pembangunan menuju Kota Kotamobagusebagai kota jasa yang aman dan asri dengan masyarakat sejahtera dan pemerintahan yang berlandaskan iman dan taqwa.

Kotamobagu, November 2016
Kepala BAPPEDA Kota Kotamobagu

SOFYAN MOKOGINTA, SH



KATA PENGANTAR
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Negeri Gorontalo

Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya, tim penyusun dari LP2M UNG dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) Kota Kotamobagu 2016 – 2030 sebagai bagian dari tanggung jawab akademik UNG dalam memberikan kontribusi guna percepatan capaian pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, demokratis, dan berbudaya.

Dokumen ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) Kota Kotamobagu 2016 – 2030. Dokumen ini berisikan data dan informasi tentang rencana aksi, program dan arah kebijakan yang mengacu pada 17 agenda SDGs yang wajib dicapai oleh para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya pemerintah Kota Kotamobagu.

Hasil kajian yang dipaparkan dalam dokumen ini pada gilirannya diharapkan akan menjadi landasan bagi penentuan arah kebijakan dan penetapan program prioritas pembangunan bagi pemerintah Kota Kotamobagu.

Akhirnya, kami berharap semoga segala hal yang kita telah laksanakan akan bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan di Kota Kotamobagu pada khususnya dan Indonesia. Semoga Allah SWT memberkahi semua usaha kita.

Gorontalo, Oktober 2016
Ketua LP2M-UNG

Prof. Dr. FENTY. U. PULUHULAWA, SH., M.Hum

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti keberhasilan yang dicapai oleh Millenium Development Goals (MDGs), yang mempedomani upaya pembangunan global selama periode 2000 – 2015 dan memperbaiki beberapa aspek yang belum tercapai dalam MDGs, pemerintah negara-negara di dunia telah merumuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang lebih dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) untuk periode 2016 – 2030.

Sejak agenda MDGs ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 dan diadopsi oleh 189 negara anggota, Indonesia telah mengimplementasi MDGs sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan komitmen Indonesia terhadap perjanjian global.

Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS per Agustus 2016, pada akhir 2015, dari 67 indikator MDGs, Indonesia telah berhasil mencapai 48 indikator, diantaranya adalah proporsi masyarakat dengan pendapatan kurang dari 1 Dolar Amerika Serikat perkapita perhari; indeks kedalaman kemiskinan; mencapai pendidikan dasar; rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat dasar, menengah, dan tinggi; presentasi anak satu tahun yang diimunisasi campak; akses universal terhadap kesehatan reproduksi; memerangi penyakit Malaria dan TBC; dan memiliki akses terhadap sumber air yang dilindungi.

Dari sekian banyak keberhasilan ini, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam pencapaian MDGs. Agenda MDGs yang belum tuntas di Indonesia meliputi pengurangan tingkat penduduk miskin dan gizi serta asupan kalori; angka kematian Ibu/AKI; kawasan tutupan hutan, emisi karbondioksida, air minum perdesaan, sanitasi layak, dan kawasan kumuh dan perkotaan; serta

rasio ekspor dan impor terhadap PDB dan akses internet (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, 2016)

Secara global dan nasional agenda-agenda MDGs yang belum tuntas tersebut kemudian menjadi agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan melalui TPB/SDGs. Agenda SDGs berpedoman pada 7 kerangka acuan dan agenda prioritas SDGs yang merupakan penyempurnaan MDGs yang dijabarkan dalam 17 target seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Acuan SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Mengakhiri Kemiskinan; (2) Menghilangkan Kelaparan; (3) Hidup Sehat

dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Terbarukan; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan); (12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Mengatasi Perubahan Iklim; (14) Sumber Daya Maritim Berkelanjutan; (15) Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh; (17) Kemitraan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Agenda ini wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing. Kewenangan ini seyogyanya dikonversi ke dalam komitmen yang tinggi dan perencanaan yang baik dalam mengimplementasi 17 Agenda SDGs. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan peninjauan dan penyesuaian agenda prioritas pembangunan masing-masing daerah dengan agenda SDGs

Salah satu dari sekian banyak kabupaten/kota di Indonesia, Kota Kotamobagu dinilai memiliki komitmen dan perencanaan yang baik dalam pencapaian target SDGs. Berdasarkan telaah terhadap RPJMD, terdapat kesesuaian yang nyata antara 17 agenda SDGs dengan visi Kota Kotamobagu dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing dan dijabarkan dalam 5 misi dan 8 prioritas pembangunan seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2013 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kotamobagu memiliki komitmen yang kuat dalam menetapkan kerangka acuan dan landasan pembangunan yang memiliki kaitan erat dengan jabanran agenda SDGs sebagai penyempurnaan MDGs.

Berdasarkan berbagai telaah dan komitmen tinggi pemerintah Kota Kotamobagu dalam implementasi SDGs, pemerintah Kota Kotamobagu berinisiatif menyusun Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) 2016 –

2030 yang juga merupakan penyelarasan dan penjabaran 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator SDGs.

TUJUAN

Secara teoritis, Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) 2016 – 2030 Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen yang tersusun untuk digunakan sebagai acuan implementasi program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2016 – 2030. Dalam kerangka praktis, Dokumen RAD-SDGs ini merupakan dasar dan pedoman bagi para pemangku kepentingan di Kota Kotamobagu dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang baik menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang inklusif seperti dalam poin jabaran berikut ini

1. Memberikan informasi kunci, tentang SDGs dan peranan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan SDGs di Kota Kotamobagu;
2. Menyediakan jabaran paket kebijakan dan program yang dapat dilaksanakan guna mencapai target SDGs dengan mempertimbangan analisis SWOT Kota Kotamobagu; serta
3. Menyediakan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan SDGs di Kota Kotamobagu.

SASARAN DAN HASIL

Sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) 2016 – 2030 Kota Kotamobagu adalah

1. Tersusunnya dokumen yang memberikan informasi kunci, tentang SDGs dan peranan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan SDGs di Kota Kotamobagu;

2. Tersusunnya dokumen jabaran paket kebijakan dan program yang dapat dilaksanakan guna mencapai target SDGs dengan mempertimbangan analisis SWOT Kota Kotamobagu; serta
3. Tersusunnya dokumen panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan SDGs di Kota Kotamobagu.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) 2016 – 2030 Kota Kotamobagu didasari oleh berbagai peraturan sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor xxx Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN SDGs

KERANGKA DASAR SDGs

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia.

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

SDGs berisi 17 Tujuan. Salah satu Tujuan adalah Tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi-pihak.



Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDGs. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”.

SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara. SDGs berlaku untuk semua (universal) negara-negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang.

Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDGs. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”.

SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara. SDGs berlaku untuk semua (universal) negara-negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang.

SDGs dalam implementasinya mencakup 17 goals, 169 target, dan 240 indikator yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan hingga tahun 2030.



Gambar 3. Tujuan, Terget dan Indikator SDGs

IMPLEMENTASI SDGs

Secara umum, implementasi SDGs dapat dilihat pada bagan di bawah ini yang mencakup pembagian wewenang para pemangku kepentingan.



Gambar 4. Distribusi Kewenangan Pemangku Kepentingan SDGs

Implementasi SDGs secara prinsip melibatkan pemerintah dan parlemen, akademisi dan para pakar, organisasi social dan media, para filantropi dan para pebisnis. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pencapaian SDGs tahun 2030.

SDGs dan Partisipasi

SDGs dibangun secara partisipatif. PBB bekerja sama dengan beberapa lembaga mitranya telah menyelenggarakan survei warga, yang disebut sebagai Myworld Survey (<http://data.myworld2015.org/>).

Hasil survei hingga November tanggal 21 pukul 11.34 telah mengumpulkan sebanyak 8, 5 juta lebih suara (persisnya 8.583.717 untuk semua negara). Untuk seluruh dunia, empat prioritas menjadi usulan yaitu pendidikan yang bermutu,

kesehatan yang lebih baik, kesempatan kerja lebih baik, dan tata pemerintahan yang jujur dan tanggap.

Untuk Indonesia, telah terkumpul 38 ribu suara (persisnya 38.422 suara), dengan prioritas yang sedikit berbeda dengan prioritas global yaitu; pendidikan yang bermutu, kesehatan yang baik, tata pemerintahan yang jujur dan tanggap, serta kesempatan kerja yang lebih baik.

Survei mengajak warga untuk memilih enam di antara 16 keadaan yang lebih baik untuk masa depan. Meksiko menjadi negara yang paling banyak menyumbang suara, dengan jumlah lebih dari 1,6 juta suara. Survei ini diadakan sejak 2013 hingga 2015, untuk menjadi masukan bagi Sekjen PBB dan para pemimpin dunia yang merumuskan dan mengesahkan SDGs pada September 2015.

Perbedaan antara MDGs dan SDGs

17 agenda SDGs secara prinsip merupakan penyempurnaan agenda MDGs. Dalam kaitan dengan penyempurnaan maka terdapat beberapa perbedaan antara MDGs dan SDGs sesuai table berikut ini.

Tabel 1. Perbedaan antara MDGs dan SDGs

MDGs 2000–2015	SDGs 2015–2030
<p>50 persen Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya</p>	<p>100 persen Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas •</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri kemiskinan • 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran • Memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.
<p>Dari negara maju, untuk negara berkembang MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju</p>	<p>Berlaku universal SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan</p>

mendukung dengan penyediaan dana.	perubahan kebijakan yang diperlukan.
Dari Atas (top down) Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.	Dari Bawah (bottom up) dan partisipatif Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga.
Solusi parsial atau tambal sulam 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan	Solusi yang menyeluruh Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan gender • Tata pemerintahan • Perubahan model konsumsi dan produksi • Perubahan sistem perpajakan • Diakuinya masalah ketimpangan • Diakuinya masalah perkotaan

SDGs dan Nawacita

Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita.

Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, kedua dokumen selaras berjalan. Dalam hal pembangunan ekonomi, keduanya juga teman seiring. Namun, dalam hal keberlanjutan, ekologi dan konservasi lingkungan hidup, maka Nawacita dan RPJMN harus melakukan banyak penyesuaian (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air, laut, dan sebagainya).

Namun demikian, secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) di antaranya:

1. Keberlanjutan agenda **pembangunan manusia** seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.

2. Peningkatan **kesejahteraan dan pendidikan** sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan **ekonomi berkelanjutan** merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses **energi** yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.
5. **Perubahan iklim**, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Keselarasan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla “Nawacita” diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian RPJMN 2014–2019 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan–tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim.



Gambar 5. Keselarasan Nawacita dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 Sumber: Yanuar Nugroho, Presentasi di Konferensi INFID, Jakarta, 6 Oktober, 2015

SDGs dan Pemerintah Daerah

Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah telah sangat aktif ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs.

Maka, bagi pemerintah daerah, “SDGs adalah kita”. Sangat wajar dan layak bila peran kota dan kabupaten menjadi sangat sangat penting. Ada sejumlah fakta dan alasan mengapa demikian:

Pertama, selama periode penyusunan dokumen SDGs (2014–2015), pemerintah daerah dan kota telah memainkan peranan sangat aktif. Salah satunya, membentuk Gugus Tugas untuk SDGs dan Habitat III [Global Taskforce of Local and Regional Governments for Post-2015 Agenda towards Habitat III (GTF)]. Gugus tugas ini secara aktif melakukan advokasi selama masa penyusunan dokumen SDGs. Gugus tugas ini terdiri dari berbagai organisasi dan asosiasi kota serta kepala daerah, di antaranya International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), The Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD), and United Cities and Local Governments (UCLG).

Kedua, salah satu keberhasilan pemerintah daerah adalah lahirnya Tujuan Nomor 11 tentang Perkotaan dan Hunian Warga yang Inklusif, Aman, Tangguh terhadap Bencana dan Berkelanjutan (UCLG, 2015).

Ketiga, Paragraph Nomor 45 dalam dokumen SDGs menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB yang mengadopsi dokumen SDGs “akan bekerja sama erat dengan otoritas regional dan pemerintah daerah” (“work closely on implementation with regional and local authorities”). Hal ini merupakan penanda yang sangat jelas tentang peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan SDGs di seluruh dunia.

Keempat, Gugus Tugas Pemerintah Daerah (GTF) dalam proses SDGs juga telah mengajukan berbagai usulan substansial yang penting, yang akhirnya masuk menjadi Tujuan dan Sasaran dalam dokumen SDGs, di antaranya:

- **Goal 3.** Kesehatan untuk semua lapisan usia, dengan usulan indikator antara lain (i) tingkat kematian penduduk akibat penyakit dan kecelakaan per 100 ribu penduduk; (ii) tingkat polusi.
- **Goal 5.** Kesetaraan gender, dengan indikator (i) keterwakilan politik perempuan yaitu proporsi kursi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat nasional dan daerah, serta (ii) proporsi perempuan dalam posisi manajer di pemerintah nasional dan daerah.

- Goal 6. Ketersediaan air dan sanitasi, dengan indikator (i) proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); (ii) pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.
- Goal 9. Pembangunan infrastruktur, dengan beberapa usulan indikator di antaranya proporsi penduduk yang berlangganan internet/broadband di antara 100 ribu penduduk (artinya, akses yang lebih luas dan terjangkau bagi semua penduduk terhadap internet).
- Goal 10. Penurunan ketimpangan dalam negara dan antar-negara dengan menerapkan indikator Rasio Palma, yaitu perbedaan antara lapisan pendapatan tertinggi 10 persen dan lapisan pendapatan termiskin 10 persen (bukan hanya Rasio Gini, yang terbukti kurang sensitif dalam memetakan ketimpangan pendapatan antara kelompok pendapatan teratas dan terbawah).
- Goal 16. Masyarakat inklusif, pemerintah daerah mengajukan usulan agar pemerintah di semua tingkatan termasuk pemerintah daerah membuka seluruh informasi mengenai anggaran pemerintah.

Sumber: Local Authorities Major Group's (LAMG). Position paper, 2015.

Pada sisi positif dan dalam konteks Indonesia, SDGs dapat menjadi momentum dan aset positif bagi kepala daerah dan birokrasi daerah, jika berhasil melaksanakan dan meraih tujuan dan target SDGs selama 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan.

Pertama, reputasi baik. SDGs dapat menjadi fokus keberhasilan. Keberhasilan memimpin suatu daerah, dalam hal ini keberhasilan melaksanakan berbagai tujuan dan target SDGs melalui berbagai ukuran kinerja yang baik akan segera disorot oleh warga dan pendapat umum termasuk media massa dan media sosial.

Kedua, parpol dan publik selalu mencari para pemimpin daerah untuk didukung dan diusulkan memimpin jabatan publik di tingkat yang lebih tinggi. Salah satu sumber utama mereka adalah para pemimpin daerah yang terbukti memiliki reputasi baik. Ideologi, keanggotaan partai politik dan afiliasi kini menjadi cair

karena parpol kekurangan calon pemimpin yang terbukti berpengalaman dari internal mereka.

Ketiga, Indonesia dan pengalaman di banyak negara memperlihatkan bahwa daerah yang berhasil merupakan sumber bagi kepemimpinan di tingkat nasional. Pelaksanaan dan keberhasilan SDGs di daerahnya akan menjadi salah satu ukuran penting bagi karir politik atas dasar prestasi, kinerja, dan kepemimpinan yang unggul.

Tantangan dan kendala. Meski demikian, pelaksanaan SDGs di kota dan kabupaten di Indonesia akan berhadapan dengan berbagai tantangan jika mengacu kepada pengalaman 15 tahun otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Berbagai kendala menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dan perombakan dalam pelaksanaan dan perwujudan SDGs di daerahnya, beberapa di antaranya;

- **Veto politik.** Para pemimpin kota dan kabupaten di Indonesia terdiri dari beragam partai politik atau koalisi partai politik. Tidak semua kepala daerah (bupati dan wali kota) akan serta merta sejalan dengan prioritas presiden terpilih. Hal ini akan menjadi kendala politik, misalnya, maukah kepala daerah menyatukan diri dengan prioritas dan target pemerintah pusat?
- **Turn over politik dan organisasi.** Di samping pergantian kepala daerah, manajemen dan birokrasi kota dan kabupaten di Indonesia juga kerap mengalami pergantian personalia, yang dapat mengganggu keberlanjutan rencana serta prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
- **Kapasitas birokrasi.** Belum semua 514 kabupaten dan kota memiliki kapasitas perencanaan dan penganggaran yang merata dan baik. Karena itu, dukungan dari pemerintah nasional dan para pemangku kepentingan lainnya akan sangat menentukan misalnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan memperluas akses warga atas air bersih dan air minum. Menata kota yang baik karenanya akan memerlukan para pemimpin yang berkomitmen, bekerja keras serta didukung oleh para kepala dinas dan tata kerja birokrasi yang cekatan dan efektif.

BAB III

METODOLOGI

KONDISI DAERAH

Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Terletak di bagian utara pulau Sulawesi, Kota Kotamobagu memiliki berbagai potensi yang menjadi modal untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan rakyat secara inklusif dan berkeadilan sesuai dengan amanat **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030**. Berbagai potensi ini secara rinci dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.

Geografis

Letak geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi $124^{\circ}15' 9,56''$ – $124^{\circ} 21' 1,93''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 41' 16,29''$ - $0^{\circ} 46' 14,8''$ Lintang Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

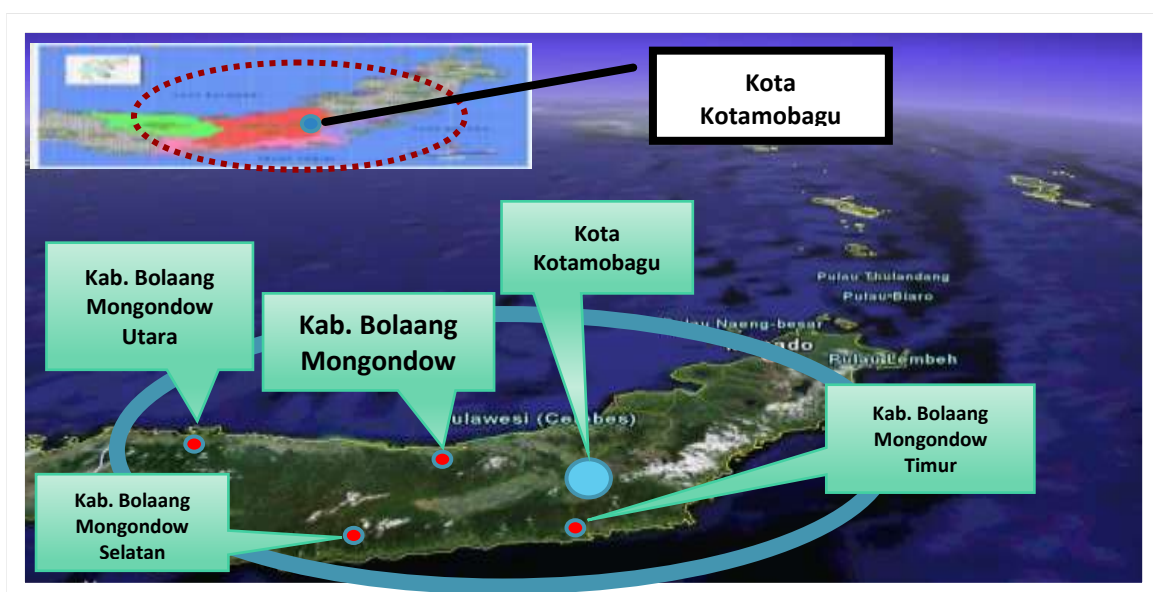
- Sebelah Utara dengan Kecamatan Passi Timur dan Kecamatan Barat
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Modayag
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lolayan
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Passi Barat

Terletak pada jarak ± 180 km di selatan Ibu Kota Provinsi (Kota Manado). Kota Kotamobagu secara Administratif terbagi dalam 4 Kecamatan dan 33 Desa/Kelurahan yang memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 68,06$ km² (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara).

Secara geografis letak Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Awalnya Kota Kotamobagu sebelum

dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya di wilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian Kota Kotamobagu harus menyiapkan dirinya menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Kota Kotamobagu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui Inobonto) dan 207,26 Km (melalui Modinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara.



Gambar 6. Geostrategis Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai daerah otonomi baru setelah terjadi pemekaran tahun 2007, Kota Kotamobagu yang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 68,06 km² (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara) berupaya untuk menyediakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kota Kotamobagu memiliki 4 kecamatan, 18 kelurahan dan 15 desa.

TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs) 2016 – 2030 Kota Kotamobagu disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut.

Tabel 2. Tahapan Penyusunan RAD-SDGs 2016 – 2030 Kota

Tahapan	Periode					Aktivitas	Output
	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Persiapan	☑	☑				Koordinasi internal tim penyusun dan dengan Pemerintah Kota Kotamobagu	Dokumen Kesepakatan dan Kerjasama
Pengumpulan Data Sekunder	☑	☑	☑			Pengumpulan data-datasekunder yang bersumber dari data pada instansi dan SKPD serta media online	Data awal untuk proses penyusunan RAD-SDGs
Presentasi Pendahuluan				☑		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi mengenai RAD-SDGs yang terkait dengan RAN-SDGs. • Penyamaan persepsi mengenai fokus yang akan menjadi substansi RAD-SDGs Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya kesepahaman antar para pemangku kepentingan tentang konsep dasar penyusunan RAD-SDGs Kota Kotamobagu yang

						Kotamobagu.	komprehensif dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Telah terhimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan yang digunakan sebagai bahan penyempurnaan RAD-SDGs
Penyusunan Laporan Pendahuluan				☐		Tim Penyusun melakukan aktifitas Penyusunan Laporan Pendahuluan melalui proses input dan analisis data sekunder maupun data primer hasil FGD pada Presentasi Pendahuluan	Executive Summary Laporan Pendahuluan
Penyusunan Draft Rancangan RAD - SDGs Kota Kotamobagu			☐	☐		Tim Penyusun melakukan aktifitas Penyusunan Draft Rancangan RAD-SDGs Kota Kotamobagu melalui proses: <ul style="list-style-type: none"> • Review menyeluruh tentang visi dan misi RPJMD Kota Kotamobagu yang berkaitan dengan perwujudan program pemerintah Kota Kotamobagu yang mendukung pencapaian SDGs; • Rumusan dan prioritas program dan kegiatan 	Penyusunan Draft Rancangan RAD - SDGs Kota Kotamobagu

						<p>SKPD berbasis kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RAD-SDGs; • Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan, serta indikator keberhasilan pencapaian program dan target SDGs; • Kejelasan tanggung jawab dan wewenang pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran dari RAD-SDGs 	
Presentasi Akhir					<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi berupa Draft Rancangan RAD-SDGs Kota Kotamobagu. • Penyamaan persepsi dan usulan, serta informasi mengenai Draft RAD-SDGs Kota Kotamobagu. 	Tercapainya kesepahaman antar para pemangku kepentingan tentang konsep Draft RAD-SDGs Kota Kotamobagu	
Penyusunan Laporan Akhir					<ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun melakukan aktifitas Penyusunan Laporan Akhir 	Executive Summary Laporan Akhir	

						melalui proses input dan analisis data dan berbagai informasi dari hasil FGD pada Presentasi Akhir	
--	--	--	--	--	--	--	--



Gambar 7. Tahapan Penyusunan RAD-SDGs 2016 – 2030 Kota Kotamobagu

METODE PENYUSUNAN RAD-SDGs

Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs Kota Kotamobagu, maka metode yang digunakan dalam Proses Penyusunan RAD ini adalah Metode Partisipatif Stakeholders atau Participatory Learning Method. Secara umum, metode ini ditujukan untuk menggali persepsi dan partisipasi Stakeholders dalam menentukan fokus dan rencana aksi yang menjadi substansi utama dalam Dokumen RAD-SDGs Kota Kotamobagu. Metode ini dilaksanakan dengan penerapan pendekatan partisipatif melalui Focuss Group Discussion (FGD) untuk membangun kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan tentang konsep dan rancangan RAD-SDGs Kota Kotamobagu sehingga dokumen ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan dan sasaran penyusunannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

VISI DAN MISI KOTA KOTAMOBAGU

Kota Kotamobagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertujuan untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kota Kotamobagu menetapkan visi dan misi sebagai landasan pembangunan Kota 2013 – 2018. Visi dan misi ini dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.

Visi Kota Kotamobagu

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu Tahun 2008 – 2025, maka visi di dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2008 – 2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2008 – 2025 bahwa visi jangka panjang Kota Kotamobagu adalah untuk menjadi “KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA YANG ASRI, BERBUDAYA, BERTAQWA DAN SEJAHTERA.” serta memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2013 – 2018 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu

Tahun 2013 – 2018 adalah “TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING” Di mana di dalam Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018 tersebut terdapat empat buah gambaran kondisi Kota Kotamobagu, yaitu Kotamobagu Kota Jasa, Kotamobagu Sejahtera, Kotamobagu Berbudaya dan Kotamobagu Berdaya Saing. Keempat kondisi Kota Kotamobagu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: KOTA MODEL JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa berbasis ekonomi kerakyatan, dengan jasa pendidikan dan kesehatan serta perdagangan dan perindustrian yang menjadi contoh di Kawasan Bolaang Mongondow Raya. SEJAHTERA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nyaman, dan harmonis. BERBUDAYA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang modern, dinamis, kreatif, dan inovatif serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan warisan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan toleransi yang tinggi bersendikan budaya dan kearifan lokal Bolaang Mongondow. BERDAYA SAING, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang sehat dan produktif, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, dan berprestasi didukung dengan pemantapan penerapan clean government dan good governance yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal dengan menyediakan infrastruktur publik yang memadai, pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab, didukung dengan insentif investasi dan pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Misi Kota Kotamobagu

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya.
3. Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanianorganik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta memberdayakan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip “Moposad dan Pogogutat Motolu Adi”.

TANTANGAN DAN HAMBATAN PEMBANGUNAN

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada 17 Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perlu dilakukan telaah terhadap tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi oleh Kota Kotamobagu dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sebagai bagian dari analisis SWOT, informasi factual ini diperlukan sebagai landasan penentuan program prioritas pembangunan pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2016 – 2030 yang sesuai dengan agenda SDGs.

Telaah permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu sesuai dengan dokumen

RPJMD 2013 – 2018 diuraikan sebagai berikut.

Permasalahan Pembangunan

Dalam menentukan permasalahan aktual pembangunan, pemerintah Kota Kotamobagu menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.
4. Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib/Pilihan).

Berdasarkan telaah dokumen RPJMD, diperoleh informasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang mencakup:

Pendidikan

1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
2. Sistem Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.
3. Fasilitas/sarana pendidikan dan penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
4. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah belum terlaksana dengan baik;
5. Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing;

Kesehatan

1. Kualitas dan Kuantitas tenaga, fasilitas, dan infrastruktur kesehatan belum memadai.
2. Kesadaran akan pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan pada sebagian masyarakat terutama di kalangan berpendidikan rendah, miskin, dan menempati daerah kumuh masih rendah.
3. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
4. Kapasitas pelayanan Puskesmas belum optimal;
5. Angka harapan hidup belum tercapai;
6. Peningkatan tipe Rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Bolaang Mongondow Raya ;
7. Pelayanan rumah sakit yang berbasis Informasi Teknologi
8. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perhubungan, Pertanahan (Kelompok Infrastruktur Dan Tata Ruang)

1. Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang belum memadai;
2. Kondisi drainase yang kurang baik;
3. Kurangnya cakupan layanan air bersih.
4. Belum terlayannya kota secara memadai untuk penanganan air limbah terpadu dengan IPAL;
5. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah;
6. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;

7. Penataan hunian rumah susun dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal;
8. Permukiman penduduk atau perumahan di banyak tempat masih menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih, ketersediaan perumahan yang layak huni masih kurang.
9. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepattumbuh.
10. Kawasan kumuh masih luas di Kotamobagu dan rasio bangunan ber-IMB masing belum maksimal. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
11. Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses
12. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
13. Sistem transportasi perkotaan yang belum memadai.
14. Sarana transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan;
15. Fasilitas transportasi publik yang belum memadai, sarana transportasi yang ada kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan.
16. Tanah yang belum disertifikasi masih banyak.
17. Sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda masih sering terjadi.

Urusan Lingkungan Hidup (Kelompok Fisik dan Lingkungan)

1. Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbul dan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem partisipatif untuk prinsip 3R ;
2. Peningkatan emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
3. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;

4. Sungai-sungai di Kotamobagu juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi pembuangan sampah;
5. Peningkatan resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.

Urusan Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepemudaan Dan Olahraga, Komunikasi Dan Informatika (Kelompok Sosial Budaya)

1. Kerjasama pemerintah, swasta dan lembaga / organisasi masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
2. Pola-pola penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal.
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
4. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
5. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
6. Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan Bolaang Mongondow (tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) belum

terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah.

7. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas.
8. Masih terjadi perdagangan perempuan (women-trafficking) dan kekerasan dalam rumah tangga.
9. Perlindungan anak dan pemenuhan hak mereka masih harus ditingkatkan untuk menyiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang.
10. Sarana dan prasarana olahraga belum tersedia secara memadai.
11. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum dikelola secara memadai.
12. Terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri
13. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
14. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal,

Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Kelompok Kependudukan)

1. Kurangnya Pelayanan publik kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.
2. Perlunya penataan, manajemen dan perilaku pelayanan publik kependudukan dan catatan sipil.
3. Database kependudukan yang masih sangat lemah sehingga data kependudukan belum menunjukkan situasi yang sesungguhnya
4. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami Kotamobagu
5. Kurangnya tenaga penyuluh KB yang terlatih.

6. Kualitas pelayanan belum maksimal sehingga Intensifikasi Pelayanan KB sangat penting.

Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian Dan Ketenagakerjaan (Kelompok Bidang Ekonomi)

1. Jumlah koperasi yang tidak aktif masih banyak.
2. Kemampuan UMKM dalam penyusunan proposal bisnis (business proposal) masih terbatas.
3. Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Promosi produk-produk UMKM baik didalam maupun diluar negeri masih kurang.
5. Perizinan satu pintu belum berjalan sebagaimana diharapkan.
6. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
7. Koordinasi antar institusi dalam rangka mendorong investasi belum optimal.
8. Insentif fiskal dan non fiskal terhadap investor untuk menarik investasi masih belum memadai.
9. Kekurangan dalam sarana dan prasarana dasar terutama pemadaman listrik sering terjadi.
10. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya;.
11. Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin, dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah.

12. Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas.

Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Statistik, Kearsipan (Kelompok Pemerintahan)

1. Kesadaran hukum dan wawasan politik serta toleransi masyarakat secara umum masih rendah.
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
3. Belum Optimalnya hubungan dan kerjasama yang baik dengan dinas / instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka melaksanakan aktivitas operasioanl di lapangan.
5. Perlunya Penguatan kelembagaan, manajemen dan SDM satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelayanan masyarakat.
6. Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan, baik di lingkup sektoral maupun lintas tingkatan pemerintahan.
7. Masih terbatasnya ketersediaan data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan yang baik.
8. Masih lemahnya kualitas kajian-kajian yang dapat menunjang perencanaan pembangunan yang baik.
9. Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

10. Terbatasnya intensitas kerjasama antar pelaku pembangunan terutama pihak swasta dan masyarakat pada umumnya dalam membangun public private partnership.
11. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam menterjemahkan dan mengintegrasikan kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan provinsi ke dalam perencanaan tingkat daerah baik dalam skala sektoral maupun dalam skala kewilayahan.
12. Lemahnya sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi perencana dan peneliti di Pemerintah Kotamobagu.
13. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh seperti kawasan perkotaan;
14. Perencanaan pembangunan yang dilakukan belum mengakomodasi secara memadai sebagai upaya menciptakan pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development).
15. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
16. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
17. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
18. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
19. Penegakan supremasi hukum masih lemah;
20. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
21. Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
22. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;

23. Kapasitas aparaturn pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah Kotamobagu relatif masih rendah;
24. Sistem remunerasi berbasis kinerja yang masih belum terimplementasi dengan baik;
25. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
26. Transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai;
27. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
28. Sumber pembiayaan pembangunan relatif belum bervariasi;
29. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan pada wilayah Bolaang Mongondow Raya belum optimal.
30. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.

Pertanian, Perternakan, Kehutanan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan (Kelompok Bidang Pertanian)

1. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan (food security).
2. Pelaksanaan program-program yang menjamin ketersediaan pangan, dan papan secara berkelanjutan belum optimal.
3. Intensifikasi penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih kurang.
4. Pengetahuan petani tentang pengelolaan agribisnis bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih kurang.
5. Kemauan dan kemampuan petani masih kurang untuk menggunakan teknologi pertanian yang lebih maju.
6. Irigasi masih kurang untuk mengatur ketersediaan dan penyaluran air untuk pertanian dan perkebunan.

7. Permukiman dan aktivitas ekonomi bertambah yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman
8. Ketergantungan pada pupuk anorganik dan pestisida masih tinggi sehingga mengurangi tingkat kesuburan tanah.
9. Ketergantungan petani yang cukup tinggi terhadap program bantuan pemerintah sehingga kurang memiliki kemandirian dan daya juang yang tinggi.
10. Pengetahuan dan kemauan masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan limbah-limbah hasil pertanian, peternakan dan perkebunan untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah.
11. Ketersediaan serta akses petani dan peternak atas saprodi masih belum memadai.
12. Modal di kalangan petani dan peternak masih terbatas.
13. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
14. Animo masyarakat, terutama kaum muda, untuk menjadi peternak dan petani professional cenderung menurun.
15. Penyakit tanaman perkebunan belum tertanggulangi secara baik.
16. Animo petani untuk beternak masih kurang dan hama penyakit ternak relatif tinggi.
17. Produksi daging masih rendah untuk memenuhi kebutuhan lokal.
18. Industri yang mendukung pengelolaan produk turunan dari komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih terbatas.
19. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan (food security).
20. Program-program penunjang ketahanan dan keamanan pangan masih kurang.
21. Hasil-hasil penelitian di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan masih kurang.

22. Penetapan klaster komoditas unggulan pertanian peternakan dan perkebunan belum optimal.
23. Pelaksanaan program-program yang menjamin ketersediaan pangan, dan papan secara berkelanjutan belum optimal.
24. Akses pemasaran hasil-hasil pertanian dan perikanan masih kurang.
25. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
26. Masih kurangnya destinasi wisata berbasis agro
 - industri;
 - perdagangan

Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDGs

Arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target SDGs dijabarkan dalam empat pilar pembangunan nasional sebagai uraian dari 17 agenda SDGs yang sejalan dengan RPJMN, Nawa Cita, dan RPJMD Kota Kotamobagu. Empat pilar tersebut yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Inklusif.

Pilar Pembangunan Sosial

GOALS	TARGET GLOBAL	TARGET RPJMN	PRIORITAS NASIONAL
	7	4	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penghidupan Berkelanjutan • Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal
	8	5	Peningkatan Kedaulatan Pangan
	13	8	Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
	10	5	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
	9	6	Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
	8	6	Ketahanan Air

Gambar 8. Pilar pembangunan Sosial RAD-SDGs 2016 – 2030 Kota Kotamobagu

Pilar pertama adalah Pilar Pembangunan Sosial. Pilar pembangunan social mencakup 6 agenda SDGs meliputi

1. **Pengentasan kemiskinan.** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. **Pengentasan kelaparan.** Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kehidupan yang sehat.** Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. **Pendidikan berkualitas.** Menjamin pendidikan yang adil dan berkualitas, serta mendukung kesempatan untuk belajar dengan stabil disepanjang hidup untuk semua orang tanpa kecuali.
5. **Kesetaraan gender.** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. **Air bersih dan sanitasi.** Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Pengentasan Kemiskinan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif			
Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu			
Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan			

kewirausahaan			
---------------	--	--	--

Pengentasan Kelaparan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok			
Stabilisasi harga bahan pangan			
Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat			
Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan			
Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan			

Hidup Sehat dan Sejahtera

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas			
Mempercepat perbaikan gizi masyarakat			
Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan			

lingkungan			
Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan			
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas			
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas			
Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan			
Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan			
Meningkatkan pengawasan obat dan makanan			
Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat			

Pendidikan Berkualitas

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun			
Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas			
Meningkatkan akses terhadap layanan			

pendidikan dan pelatihan keterampilan			
Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan			
Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya			
Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel			
Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru			
Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi			
Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi			
Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi			
Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi			

Kesetaraan Gender

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan			
Menekankan peran perempuan di bidang politik			
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)			

Air Bersih dan Sanitasi

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi			
Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat			
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi			
Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya			
Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat			
Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif			
Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim			
Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan			

ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi			
--	--	--	--

Pilar Pembangunan Ekonomi

GOALS	TARGET GLOBAL	TARGET RPJMN	PRIORITAS NASIONAL
	5	3	Kedaulatan Energi
	12	9	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi Nasional • Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja • Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
	8	3	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan • Penguatan Investasi • Akselerasi Industri Manufaktur • Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
	10	6	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan Perbatasan • Pembangunan Daerah Tertinggal • Pemerataan pembangunan antar wilayah • Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah
	10	7	Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pilar kedua adalah Pilar Pembangunan Ekonomi. Pilar pembangunan ekonomi mencakup 5 agenda SDGs meliputi:

7. **Energi Yang Bersih dan Murah.** Menjamin akses pada energi yang murah, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. **Pekerjaan yang layak & pertumbuhan ekonomi.** Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk semua, dimana terdapat pekerjaan yang layak bagi yang membutuhkannya.

9. **Industri, inovasi, infrastruktur.** Membangun infrastruktur yang tahan perubahan, mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, dan membantu inovasi.
10. **Mengurangi kesenjangan.** Mengurangi kesenjangan dalam sebuah negara dan antara negara-negara.
11. **Kota dan komunitas yang berkelanjutan.** Menciptakan kota-kota yang aman untuk semua, tahan terhadap perubahan, dan berkelanjutan.

Energi Terjangkau dan Terbarukan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energy dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya peraturan pelaksana penggunaan energi baru terbarukan 2. Penggunaan minimal 20% energi baru terbarukan di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu 3. Penggunaan minimal 15% energi baru terbarukan di lingkungan masyarakat Kota Kotamobagu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 2. 2025 3. 2030 	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatkan aksesibilitas energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah tangga pengguna listrik di atas 90% 2. Penyediaan akses gas kota untuk rumah tanggam minimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 2. 2030 3. 2030 	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

	25% 3. Peningkatan akses gas untuk transportasi dan industri minimal 50%		
Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA	1. Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam pembangunan PLTA	1. 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan PDB per kapita pertahun di atas 7% Peningkatan sumber pendapatan baru masyarakat Peningkatan akses pasar terhadap hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Akses layanan keuangan formal bagi UMKM minimal 50% Peningkatan akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 2030 2025 2020 2025 2025 2025 	

	<p>pengembangan teknologi</p> <p>6. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka hingga 4-5%</p>		
<p>Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan peraturan bidang pariwisata 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang pariwisata 3. Membangun destinasi wisata yang berbasis wisata alam, berbasis agro industri dan perdagangan, dan berbasis konservasi budaya dan lingkungan hidup (minimal 1 kecamatan satu destinasi) 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi wisata melalui media nasional maupun media asing 5. Peningkatan jumlah kunjungan wisata dalam dan luar negeri minimal 100 ribu kunjungan 6. Pembentukan kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 2. 2017 3. 2030 4. 2020 5. 2025 6. 2017 	<p>Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial</p>

	pariwisata berbasis komunitas		
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah tenaga kerja formal minimal 75% dari angkatan kerja 2. Perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/subsektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi minimal 50% tenaga kerja usia produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 2. 2025 	Dinas Tenaga Kerja
Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan peraturan tentang iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang berkadilan 2. Menciptakan kesempatan kerja bagi usia produktif berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, dan penyandang disabilitas 3. Menciptakan rasio upah pekerja penerima upah untuk jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 2. 2020 3. 2020 	Dinas Tenaga Kerja

	yang samaberdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas		
Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan peraturan pembentukan dan operasional lembaga keuangan bukan bank 2. Program 1 Kelurahan 1 Koperasi yang berbasis keunggulan ekonomi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 2. 2020 	Dinas Koperasi dan UKM

Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Percepatan pembangunan infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan akses jalan dan jembatan dari dan ke sentra ekonomi rakyat 2. Pembangunan infrastruktur irigasi berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan 3. Pengentasan wilayah kumuh perkotaan 4. Mendorong akselerasi pertumbuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 2. 2025 3. 2025 4. 2020 5. 2030 	Dinas Pu, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tata Kota

	<p>industri yang berbasis jasa dan lingkungan</p> <p>5. Mendorong dibangunnya bandar udara untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya</p>		
Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi	Mendorong penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung daya saing sektor produksi barang dan jasa penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global	2020	Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja
Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang 2. Mendorong penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 2. 2018 	Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja
Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar	Pembangunan Pusat Riset Daerah	2020	Dinas Pendidikan
Peningkatan akses masyarakat terhadap IPTEKS	Pembangunan taman tekno, taman sains dan taman seni	2018	Dinas PU, Dinas Tata Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial
Akselerasi pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan peraturan tentang industri kreatif 2. Membangun sentra industri kreatif berbasis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 2. 2018 3. 2018 4. 2018 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas

	<p>komunitas</p> <p>3. Membangun Sentra Industri Kecil dan Menengah minimal 1 kelurahan 1 sentra industri</p> <p>4. Mempermudah akses keuangan formal bagi industri kreatif dan UMKM</p>		Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga
--	--	--	---------------------------------------




Mengurangi Kesenjangan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Menciptakan pertumbuhan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Gini Ratio</i> di bawah angka 0.4 2. Tingkat Kemiskinan 5 - 6% 3. Akses pangan bergizi bagi masyarakat 4. Memperbesar investasi padat kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 2. 2025 3. 2025 4. 2018 	Dinas Sosial
Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal	Akses jaminan sosial dan asuransi bagi pekerja informal	2020	Dinas Sosial
Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok 2. Menekan laju inflasi pada kisaran angka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 2. 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial

Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Perwujudan Sistem Perkotaan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan berbasis ICT Pengentasan kawasan pemukiman kumuh Penerapan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen perkotaan(Smart City) Pembangunan kota hijau nyaman anak, lansia, dan penyandang disabilitas Pembangunan kota nyaman pendidikan berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal Pembentukan forum komunitas kota Tersusunnya rencana umum transportasi kota 	<ol style="list-style-type: none"> 2025 2025 2025 2025 2030 2019 2019 	

Pilar Pembangunan Lingkungan

GOALS	TARGET GLOBAL	TARGET RPJMN	PRIORITAS NASIONAL
	11	7	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan agroindustri, hasil hutan kayu, perikanan dan hasil tambang berkelanjutan Perbaikan kualitas lingkungan (termasuk perilaku ramah lingkungan)
	5	2	Penanganan Perubahan iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan
	10	7	Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan: <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut:

Pilar ketiga adalah Pilar Pembangunan Lingkungan. Pilar pembangunan lingkungan mencakup 4 agenda SDGs yakni:

12. **Konsumsi dan produksi yang bertanggung-jawab.** Menjamin konsumsi dan mendukung pola pola produksi yang berkelanjutan.
13. **Beraksi untuk iklim.** Mengambil langkah & tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. **Kedamaian dan keadilan.** Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
15. **Kemitraan untuk pengembangan yang lestari .** Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Penerapan pola produksi dan konsumsi			

berkelanjutan			
---------------	--	--	--

Mengatasi Perubahan Iklim

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana			
Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim			
Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana)			
Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan			
Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan			

Sumber Daya Maritim Berkelanjutan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Percepatan pengembangan			

ekonomi Kelautan			
Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut			
Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan			
Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir			

Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik	1.		
Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak			
meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan			

lingkungan yang kuat			
----------------------	--	--	--

Pilar Pembangunan Inklusif

Pilar keempat adalah Pilar Pembangunan Inklusif. Pilar pembangunan inklusif mencakup 2 agenda SDGs yakni:

16. **Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan**, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. **Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.**

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil			
Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik			
Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi			
Penerapan <i>open</i>			

<i>government</i>			
Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis			
Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit			
Peningkatan kualitas pelayanan publik			
Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik			
Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya			
Meningkatkan kualitas penegakan hukum			
Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM			
Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat			
Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak			
Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi			
Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi			
Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi			
Meningkatkan			

pengecahan korupsi			
Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan			
Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan			
Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal			

Kemitraan Global Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

Rencana Aksi	Program	Target (Tahun)	SKPD Pelaksana
Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran			
Mendorong pembangunan <i>fixed/wireline broadband</i>			
Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)			
Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis			
Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik			
Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dibidang ekonomi			